

BAB I

KISAH AWAL PENCARIAN ILMU PENGETAHUAN

*“Dia menanyakan data si korban
Di jawab dengan
Jerit kesakitan
Suster menyarankan bayar ongkos pengobatan
Ai sungguh sayang korban tak bawa uang
Suster cantik ngotot
Lalu melotot
Dan berkata “Silahkan bapak tunggu di muka!”
Hai modar aku 2x
Jerit si pasien merasa kesakitan
Hai modar aku 2x
Jerit si pasien merasa diremehkan”
(Ambulance Zig Zag, Iwan Fals)*

1.1 Prolog

Penggalan lirik lagu di atas menyayat hati saya, menggambarkan telah hilangnya rasa empati oleh penyedia jasa pelayanan kesehatan. Penyedia jasa pelayanan kesehatan yang sejatinya adalah lembaga yang berasaskan Pancasila dan tidak diskriminatif kini telah berganti fungsi menjadi lembaga yang kapitalis. Penyedia jasa pelayanan kesehatan dijadikan sebagai ladang bisnis bagi para kapitalis, sehingga harus tunduk akan keinginan para pemilik modal yang menginginkan perolehan laba yang besar.

Tidak berhati nuranilah para pemilik penyedia jasa pelayanan kesehatan, jika nyawa seseorang harus diukur dengan angka-angka rupiah. Sesungguhnya kesuksesan bisnis jasa layanan kesehatan tidak boleh diukur dengan meningkatnya pendapatan rumah sakit. Karena penyedia jasa pelayanan kesehatan haruslah mengedepankan pelayanan yang baik kepada pasien. Jika misi laba tertanam di tiap-tiap jasa layanan kesehatan maka celakalah. Maka akibatnya semakin banyak calon pasien dan pasien menjadi korban kekapitalisasian bisnis jasa pelayanan kesehatan.

1.2 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu lembaga penyedia jasa pelayanan kesehatan. Rumah sakit memiliki peranan yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di era globalisasi pada saat ini semuanya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, rumah sakit juga mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut Laksono (2005) dalam situs Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (persi.co.id) secara *de facto*, rumah sakit di Indonesia adalah sebagai dampak dari berbagai perubahan lingkungan lokal dan global, sudah bergeser dari lembaga sosial menjadi lembaga usaha. Itu berarti dari lembaga yang semula tidak berorientasi pada laba (nirlaba) berkembang menjadi lembaga yang berorientasi pada laba. Hal tersebut senada dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 bahwasannya rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan *profit* dengan bentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Rumah sakit dengan bentuk badan hukum perseroan tidak hanya memiliki tanggung jawab sosial kepada pasien. Namun juga memiliki tanggung jawab bisnis kepada para penanam modal atau pemegang saham. Maka berjalannya rumah sakit privat harus sejalan dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Para pemegang saham berhak mendapatkan dividen yang berasal dari laba kegiatan operasional rumah sakit. Menurut Warren, dkk (2005: 425), dividen adalah pembagian laba suatu perseroan kepada para pemegang sahamnya. Sedangkan menurut James M. Reeve, dkk (2010: 275), dividen adalah aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Pembayaran dividen dapat dijadikan tolak ukur oleh para pelanggannya dalam menilai perusahaan.

Besarnya dividen ini mempengaruhi harga saham. Pembayaran dividen erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Jika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka kemampuan membayar dividen juga besar. (Mauliani, dkk : 2014).

Beberapa literatur akuntansi menjelaskan bahwa konsep laba adalah pendapatan dikurangi dengan beban dalam waktu satu periode. Pendefinisian laba sebagai pendapatan dikurangi biaya adalah definisi secara struktural karena laba tidak diartikan secara terpisah dari pengertian pendapatan maupun biaya (Haron, Saringat et al. 2013). Hal tersebut senada dengan pendapat Belkaoui (2000:332) menyatakan bahwa laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya *historis*. Dalam metode *historical cost* (biaya historis) laba diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dan akhir periode yang masing-masing diukur dengan biaya historis, sehingga hasilnya akan sama dengan laba yang dihitung sebagai selisih pendapatan dan biaya.

Dengan ketentuan diperbolehkannya mencari laba, maka harus tetap diingat bahwa kepentingan bisnis oleh pemilik usaha dalam bidang jasa rumah sakit harus tetap memperhatikan hak-hak pasien baik sebagai pihak yang harus dilayani kesehatannya juga sebagai konsumen. Para pemilik modal atau para pemegang saham rumah sakit tidak boleh terlalu menuntut pertumbuhan laba yang tinggi dalam bisnis jasa pelayanan kesehatan yang sarat dengan kepentingan umum. Dapat dibayangkan bahwa jika sebuah rumah sakit atau penjual memaksimalkan laba dan tidak mempunyai integritas yang kuat terhadap norma-norma agama dan sosial, sangat dengan mudah terjadi *abuse* atau *moral*

hazard yang dapat dilakukan rumah sakit melalui dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. (depkes.go.id/Naskah Akademik RUU Rumah Sakit, 16 Agustus 2016).

Pada kenyataannya *moral hazard* memang terjadi, salah satu contohnya seperti kasus bayi Tiara Debora. Tiara Debora mendapat perlakuan berbeda oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga yakni tidak mendapatkan penanganan PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*) yang merupakan pelayanan intensif untuk anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital, hal ini dikarenakan masalah kendala biaya. Rumah Sakit Mitra Keluarga justru menyarankan untuk melakukan rujukan pada rumah sakit lain yang menyediakan BPJS dalam kondisi darurat sehingga Tiara Debora terlambat tertangani dan meninggal dunia. (megapolitan.kompas.com, 14/09/2017)

Kasus yang di atas terjadi karena pasien diposisikan sebagai “pelanggan” dan rumah sakit dianggap sebagai “perusahaan” merupakan dasar pemikiran yang pragmatis. Berasumsikan bahwa rumah sakit merupakan miniatur perusahaan yang berlabel “pelayanan jasa secara *humanis*”. Jika hal tersebut diposisikan sebagai “perusahaan” berarti rumah sakit berorientasikan pada laba dan tindakan pelayanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk tujuan komersial kepada pihak “pelanggan”. Sedangkan memposisikan pasien sebagai “pelanggan” adalah hal yang tidak manusiawi (Nurindasari, 2016: 3).

Kondisi rumah sakit yang pragmatis dicerminkan pada penelitian As Shidieq & Hendrartini (2014:3-4) yang memberikan analisis adanya pembebanan biaya pada pasien melalui sistem kapitasi dan premi berdasarkan biaya klaim

dan utilisasi. Ketika ada orang yang sedang mengalami musibah yaitu sakit, dianggap sebagai beban yang seolah-olah hal tersebut mengurangi masa utilitas perlengkapan dan tenaga rumah sakit yang mana beban tersebut harus digantikan oleh pihak pasien dengan membayarkan biaya sesuai perhitungan rumah sakit. Sama halnya seperti tidak rela memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dan mengharapakan untuk pengembalian yang lebih.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurindasari (2016), mengemukakan bahwa sebenarnya beban dari rumah sakit ditanggung oleh Negara. Namun kondisi di Indonesia kurang memungkinkan jika pengelolaan dana untuk rumah sakit ditanggung semua oleh Negara terutama rumah sakit Negara. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan dana pada tataran Pemerintah pun masih kurang baik dan terstruktur. Sebenarnya inisiatif Pemerintah untuk menggandeng rumah sakit telah terbukti dengan adanya BPJS. Namun kondisi tersebut juga kurang menjangkau masyarakat secara luas. Sehingga sistem tolong-menolong (*ta'awun*) anatar Pemerintah dengan masyarakat kurang bisa menjadi satu kesatuan. Sehingga dari sini perlu adanya kesadaran dari tiap individu manusia.

Salah satu individu yang sadar akan hakikat manusia harus tolong-menolong (*ta'awun*) adalah pemilik RS Fathma Medika. Pemegang sahamnya atau pemiliknya tidak menjadikan laba sebagai ukuran kesuksesan bisnis rumah sakit adalah Rumah Sakit Fathma Medika Gresik. Rumah sakit lebih dijadikan sebagai jembatan untuk beribadah sosial bagi pemilik rumah sakit. Rumah Sakit Fathma merupakan rumah sakit privat kelas C yang resmi dioperasikan pada tahun 2014. RS Fathma Medika terletak di sebelah utara kabupaten Gresik tepatnya di Jalan Pendopo no. 45 Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. RS Fathma Medika berdiri dibawah naungan PT Hidup Makmur

Sejahtera (HMS). Dalam penyelenggaraan kegiatan operasionalnya Rumah Sakit Fathma Medika ditunjang oleh pendapatan yang diperoleh dari pasien dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan proporsi pasien BPJS lebih banyak yaitu 80% pasien berobat menggunakan BPJS, 20% pasien reguler atau non BPJS.

Berdasarkan observasi awal, peneliti mendapati bahwa pemegang saham RS Fathma Medika tidak menuntut laba yang tinggi. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit tidak pernah didapati kasus *moral hazard*. RS Fathma Medika yang sepanjang perjalanan bisnisnya tidak pernah menolak pasien karena terkendala biaya. Beberapa kegiatan yang diadakan oleh RS Fathma Medika untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata terutama untuk warga dengan kendala biaya antara lain rutin mengadakan bakti sosial, juga memberikan kuota layanan khusus bagi pasien yang benar-benar tidak mampu. Mulai keringanan hingga pembebasan biaya pengobatan (www.pressreader.com/jawa-pos/2016/11/10).

Bapak Sambari selaku Bupati Gresik saat berkunjung ke RS Fathma Medika mengatakan bahwa ; *"Ini rumah sakit yang luar biasa. Dibangun untuk melayani masyarakat miskin. Dan keberadaannya sudah sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terutama untuk pasien kurang mampu"* (surabaya.tribunnews.com/2016/07/16). Memang rumah sakit ini layak disebut rumah sakitnya orang miskin. Bagaimana tidak, beragam fasilitas sengaja digratiskan untuk warga kurang mampu. Termasuk layanan ambulan gratis selama 24 jam, untuk antar jemput pasien

yang tinggal di Kecamatan Manyar, Bungah, Sidayu, Dukun, Ujung Pangkah dan Kecamatan Panceng.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui serta menggali kesadaran pemilik RS Fathma Medika tentang seberapa pentingnya laba yang diambil dari bisnis rumah sakit. Mengingat rumah sakit merupakan bisnis yang syarat akan kepentingan umum, yang menyangkut nyawa manusia. Terdapat kepentingan yang sangat berbenturan di rumah sakit antara bisnis dan sosial. Kepentingan bisnis berorientasi pada pengambilan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan sosial mengutamakan pelayanan dengan tidak diskriminatif kepada semua kalangan masyarakat, sehingga menarik untuk diteliti tentang makna laba bagi pemilik rumah sakit. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian ini berasal dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif berfokus penelitian tentang pemaknaan laba.

Salah satu penelitian yang menjadi acuan adalah penelitian tentang makna laba dibidang jasa pelayanan kesehatan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mursy dan Rosidi (2013), menemukan ada tiga makna laba. Pertama, laba dimaknai dari bentuknya secara abstrak yaitu rasa. Kemudian makna yang kedua, wujud laba sebagai rasa syukur dan rasa bahagia. Ketiga, laba berfungsi sebagai penebar rasa bahagia.

Senada dengan penelitian di atas tentang makna laba bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) mengungkap pemaknaan keuntungan bagi seorang dokter yang menemukan bahwa pemaknaan keuntungan bagi profesi dokter muncul dalam empat makna yakni; “Keuntungan” dalam bentuk tabungan dalam kaitannya dengan

pemenuhan materi, “Keuntungan” spiritual dalam selalu menolong orang lain maupun mengembalikannya kepada Tuhan. “Keuntungan” ketiga adalah “keuntungan” martabat yang disegani oleh masyarakat. “Keuntungan” keempat adalah “keuntungan” kepuasan batin apabila pasien yang dirawatnya dapat sembuh.

Penelitian tentang pemaknaan laba tidak hanya dilakukan di bidang jasa kesehatan saja, namun juga bidang yang lain. Purnamasari, dkk (2010) meneliti pemaknaan laba di bidang pendidikan, hasilnya menunjukkan ada tiga makna “laba” dalam organisasi nirlaba pendidikan, yaitu materi “untung”, sosial “untung”, dan memorial “untung”. Bahan “Laba” digunakan untuk membayar utang dari organisasi nirlaba. “Keuntungan” sosial adalah arti dari “laba” yang dipahami oleh siswa yang mendapat manfaat dari potongan harga dari sekolah. “Laba” ketiga adalah “keuntungan” memorial yang berarti nilai bagi setiap pemangku kepentingan dari organisasi ini, yang dapat mengingat indah saat mereka belajar dan bekerja di sekolah.

Kemudian penelitian tentang pemaknaan laba dengan objek pedagang kaki lima oleh Asiyah, dkk (2017) menafsirkan ada 2 makna laba bagi pedagang kaki lima. Makna yang pertama yaitu laba materi dalam bentuk simpanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekarang maupun nanti dimasa yang akan datang. Makna yang kedua yaitu laba spritual yang terlihat dari kemauan pedagang kaki lima untuk tetap melaksanakan perintah Allah SWT dalam bentuk sumbangan.

Setelah kita ketahui beberapa penelitian tentang makna laba yang digali dari beberapa kesaaran individu dan entitas. Selain makna laba ternyata ada juga penelitian yang menggali tentang “kosep laba”, dilakukan oleh Ekasari

(2014) konsep laba dari perspektif Islam berbasil Al-Quran. Membedah makna keuntungan dalam Al-Qur'an ditujukan kepada manusia agar selaku berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Namun sejatinya metafora keuntungan yang diperuntukkan untuk manusia tersebut dapat diterapkan dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Konsep laba berbasis Al Qur'an menggarisbawahi bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan seyogyanya tidak hanya memperkaya perusahaan saja, namun sebaiknya sebagian dari keuntungan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat manusia, alam dan lingkungan. Dengan semakin banyak berbagi maka perusahaan akan semakin makmur.

Bedah konsep laba juga dilakukan oleh Farhan (2016) mengungkapkan makna laba dalam pandangan Ibnu-Khaldun. Mendapatkan 4 pemahaman tentang pemaknaan laba. Ibnu Khaldun memaknai laba sebagai; 1) tambahan nilai yang disebabkan karena adanya tambahan nilai produksi, 2) laba dipengaruhi oleh respon permintaan karena ada perubahan harga dan kebutuhan masyarakat, 3) laba harus tercipta dari kerja nyata yang dapat menambah nilai barang atau jasa, 4) keuntungan yang diperoleh secara tidak sengaja merupakan rezeki dari Allah SWT.

Penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwasannya laba memiliki makna yang luas bukan hanya diukur dari segi materi saja. Namun laba memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman spiritual setiap individu pelaku bisnis. Oleh karena itu peneliti tertarik mengembangkan penelitian tentang makna laba dari sudut pandang pemilik rumah sakit dimana bisnis rumah sakit lebih sarat akan kepentingan sosial dibandingkan dengan mencari laba yang besar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan makna dan kebijakan pengambilan laba oleh pemilik RS Fathma Medika Gresik. RS Fathma Medika merupakan rumah sakit privat yang sejatinya selain memiliki tujuan sosial juga memiliki tujuan bisnis. Dua fungsi yang sangat bertolak belakang. Fungsi sosial untuk menyembuhkan pasien. Sedangkan fungsi bisnis untuk memperoleh laba untuk pemilik bisnis rumah sakit. Ditengah fungsi rumah sakit yang bertolak belakang ini, bagaimana kesadaran pemilik rumah sakit mengenai kebijakan perolehan laba rumah sakit dan bentuk pemaknaan labanya bagi pemilik rumah sakit? Kemudian dari kesadaran yang didapat dari pemilik RS Fathma Medika disintesis dengan ajaran agama Islam, sehingga muncul lah pertanyaan bagaimana pandangan Islam memaknai laba?

Penelitian ini menggunakan dua informan utama dan empat informan pendukung yakni dua karyawan RS Fathma Medika, pasien rumah sakit, dan ulama'. Dua informan utama akan digali kesadarannya atas laba dalam ranah RS Fathma Medika dalam membuat kebijakan penggunaan laba di rumah sakit dan dampak laba bagi pemilik rumah sakit, ditengah maraknya kasus kekapitalisasian rumah sakit, yang lupa akan fungsi sosial rumah sakit dan lebih memperhitungkan perolehan laba yang besar. Tiga informan pendukung disertakan untuk memperkuat fakta yang ditemukan dari informan pertama. Ditambah informan ulama' sebagai informan yang dimintai pendapat tentang laba dalam pandangan Islam, karena informan utama memiliki nilai-nilai agama dalam memaknai laba yang diperoleh dari bisnis rumah sakit.

1.4 Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang serta pertanyaan yang muncul pada rumusan masalah diatas maka jawaban dari pertanyaan tersebut mempunyai tujuan, di mana tujuan dari penelitian ini untuk menggali secara mendalam kesadaran akan makna laba bagi pemilik RS Fathma Medika. Mengungkap keunikan atas pemahaman pemilik tentang seberapa pentingnya laba bagi kehidupan pemilik serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan terkait dengan laba yang diperoleh dari bisnis rumah sakit. Ditengah maraknya fenomena yang terjadi saat ini, yang mana pada saat ini bisnis rumah sakit menjadi bisnis yang kapitalis hingga membuat rumah sakit melakukan tindakan *moral hazard* dikarenakan tuntutan kepentingan pemilik rumah sakit untuk memperoleh laba yang tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan nantinya penelitian ini dapat bermanfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Ada tiga pihak yang dijadikan sasaran untuk dapat memanfaatkan hasil penelitian ini :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berkontribusi bagi para akademisi untuk mengembangkan teori tentang definisi laba, cara pengambilan laba dan cara pendistribusian atau pemanfaatan laba.

2. Bagi Pemilik Rumah Sakit Swasta

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berkontribusi bagi para pemilik rumah sakit. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan koreksi untuk meningkatkan kepedulian kemanusiaan kepada warga yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan dengan tidak menginginkan laba yang terlalu tinggi.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berkontribusi bagi pemerintah. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan koreksi bagi pemerintah untuk regulasi dan kebijakan dalam bidang kesehatan. Regulasi dan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh sangat besar untuk warga, hendaknya regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata bagi semua warga tanpa terkecuali. Dalam regulasi dan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk bidang layanan kesehatan seharusnya tidak boleh ada regulasi dan kebijakan tentang diperbolehkannya membangun rumah sakit untuk kegiatan berbisnis. Yang hakekatnya tujuan bisnis bertolak belakang dengan tujuan kemanusiaan, sehingga rumah sakit terkesan lembaga yang kapitalis.